

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu penentu keberhasilan dalam suatu pemerintahan baik dalam skala nasional maupun daerah. Pertumbuhan dalam rangka pemerataan pembangunan secara adil diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah yang mulai dilaksanakan secara efektif pada tahun 2001. Kebijakan otonomi daerah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah mengatur tentang pelaksanaan sistem desentralisasi di Indonesia, dimana sistem pemerintahan yang pada awalnya bersifat sentralisasi (terpusat) diganti menjadi sistem desentralisasi. Dalam sistem otonomi daerah ini, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada masing-masing pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri sehingga pelaksanaan otonomi daerah ini dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Arifiyanto, 2013). Daerah yang mampu melakukan otonomi memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu (a) daerah memiliki kemampuan serta kewenangan untuk mengelola dan menggunakan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, (b) mengurangi ketergantungan bantuan kepada pusat sehingga pendapatan asli daerah dapat menjadi sumber pendapatan terbesar. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, transfer dana ke daerah tidak dapat dihindari karena pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menyelesaikan urusan pemerintahannya. Transfer dana (dana perimbangan) yang diberikan oleh pemerintah pusat ke daerah dijadikan sebagai sumber penerimaan utama daerah dibandingkan dengan pendapatan

asli daerah padahal besarnya pendapatan asli daerah merupakan tolak ukur keberhasilan otonomi (Sasana, 2011).

Berikut ini adalah tingkat pendapatan asli daerah di keempat Kabupaten yang ada di Pulau Madura yaitu Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep.

Tabel 1.1 Jumlah pendapatan asli daerah di Madura tahun 2014-2016
(*dalam jutaan rupiah)

KABUPATEN	PENDAPATAN			PENDAPATAN ASLI DAERAH		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Bangkalan	1,643,100	1,804,597	2,042,254	135,785	159,392	165,985
Sampang	1,364,736	1,369,017	1,711,101	123,039	121,298	120,965
Pamekasan	1,527,493	1,560,088	1,846,498	171,518	125,126	142,771
Sumenep	1,647,362	1,854,424	2,161,238	162,372	166,654	169,033

Sumber: infoanggaran.com (2017)

Tingkat pendapatan asli daerah di keempat Kabupaten di Pulau Madura cenderung stagnan dari tahun 2014-2016, pendapatan asli daerahnya hanya meningkat sedikit namun di Kabupaten Pamekasan justru mengalami penurunan yang cukup drastis pada tahun 2015 sedangkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Sumenep dari tahun 2014-2016 terus mengalami peningkatan walaupun peningkatannya tidak begitu besar. Hal tersebut justru berbanding terbalik dengan total pendapatan di masing-masing Kabupaten di Pulau Madura yang selalu mengalami peningkatan.

Rendahnya tingkat pendapatan asli daerah dapat menyebabkan daerah belum bisa mandiri dalam desentralisasi fiskal sehingga daerah masih terus membutuhkan suntikan dana dari pemerintah pusat agar mampu menyelesaikan

urusan pemerintahan daerahnya. Menurut Prasetya (2014) pengembangan pariwisata dapat mempengaruhi peningkatan pada pendapatan daerah, peningkatan dari PAD dapat berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakatnya serta daerah mampu memenuhi kebutuhan daerahnya. Dalam penelitian Nurasmah (2015) menyatakan bahwa pariwisata mampu menambah pendapatan serta devisa Negara, disamping itu juga dapat menjadi penggerak pembangunan di Indonesia serta mampu mendorong peningkatan ekonomi local masyarakat sekitar kawasan wisata. Sektor pariwisata merupakan sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian karena didalamnya termasuk juga restoran, hotel, produk-produk yang dihasilkan masyarakat melalui UMKM serta nilai dari wisata itu sendiri. Salah satu Kabupaten kota di Pulau Madura yang pengembangan wisatanya baik adalah Kabupaten Sumenep.

Tabel 1.2 Data kunjungan wisata di Jawa Timur tahun 2014-2015

NO	KABUPATEN / KOTA	JUMLAH PENGUNJUNG			
		TH. 2014		TH. 2015	
		Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman
1.	Surabaya	5.530.694	39.257	6.985.261	55.558
2.	Malang	2.405.304	23.312	3.484.369	99.600
3.	Batu	1.833.448	4.397	2.261.493	3.815
4.	Banyuwangi	1.457.882	31.184	1.926.179	46.214
5.	Sumenep	544.245	378	626.921	417
6.	Jember	505.207	483	1.165.680	1.223
7.	Probolinggo	441.560	16.497	397.301	23.268
Untuk Tahun 2016 angka kunjungan wisata ke Sumenep mengalami peningkatan :					

Sumber: Dinas pariwisata, pemuda dan olahraga Kabupaten Sumenep (2017)

Dalam data kunjungan wisata di Jawa Timur, Kabupaten Sumenep pada tahun 2014 memiliki jumlah wisatawan nusantara tertinggi kelima setelah Surabaya, Malang, Batu, dan Banyuwangi serta terus mengalami peningkatan jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2015. Dalam data tersebut juga

menunjukkan bahwa Kabupaten Sumenep merupakan satu-satunya kabupaten di Madura yang masuk dalam kunjungan wisata tertinggi di Jawa Timur dibandingkan dengan tiga Kabupaten lain di Madura yaitu Bangkalan, Sampang dan Pamekasan, walaupun dalam data tersebut Kabupaten Sumenep tidak begitu menonjol dalam jumlah kunjungan wisatawan jika dibandingkan dengan kota lainnya di Jawa Timur namun di Madura, Kabupaten Sumenep lebih menonjol daripada Kabupaten lainnya di Madura. (DisparbudporaKab. Sumenep, 2017).

Kabupaten Sumenep merupakan salah satu kota yang berada di Pulau Madura. Kabupaten Sumenep terbagi menjadi dua bagian wilayah yaitu daratan dan kepulauan dimana luas daratannya 1.146,93 Km² dengan 18 kecamatan yang terdiri dari 248 desa/kelurahan, sedangkan wilayah kepulauan memiliki luas 946,54 Km² dengan 9 kecamatan dari 85 desa. Menurut Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep Sufiyanto saat mengisi kuliah tamu 'perencanaan pembangunan ekonomi wilayah' di Universitas Trunojoyo Madura (20 November 2017) menyatakan bahwa Kabupaten Sumenep memiliki jumlah penduduk 1.126.000 jiwa serta gugusan pulau sejumlah 126 pulau dimana 48 pulau berpenghuni dan 78 pulau tidak berpenghuni. Menurut Sufiyanto (2017) potensi pengembangan wilayah Kabupaten Sumenep berdasarkan RPJMD 2016-2021 terdapat 7 potensi dimana salah satunya adalah sektor pariwisata. Pemerintah Kabupaten Sumenep mengembangkan kebijakan destinasi pariwisata dengan program 'visit sumenep 2018' dimana indikator kinerjanya yaitu peningkatan jumlah kunjungan, lama tinggal dan adanya perputaran uang serta implementasi strategi yaitu

pengembangan destinasi, pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan SDM, masyarakat dan industri pariwisata.

Dalam skala nasional Indonesia memiliki penduduk yang mayoritas menganut Agama Islam dan menjadi Negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia dengan jumlah penduduk muslim sebanyak 209 juta jiwa pada tahun 2011 seharusnya dapat melihat potensi wisata dari sudut pandang yang berbeda serta mampu mengembangkan konsep pariwisata berdasarkan nilai-nilai keislaman dengan melihat jumlah wisatawan mancanegara pada tahun 2010 sekitar 18% merupakan wisatawan muslim, wisatawan tersebut dapat dijadikan potensi dalam pengembangan wisata halal melihat potensi pasar pada *muslim traveler* yang sangat potensial hingga mencapai 1,6% dari populasi dunia. Pengembangan wisata halal di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar jika dilihat dari jumlah total pengeluaran wisatawan muslim global yaitu sebesar US \$ 151 billion, besarnya pengeluaran wisatawan muslim tersebut hampir sama dengan pengeluaran wisatawan cina yaitu sebesar US \$ 168 billion sedangkan pengeluaran wisatawan Indonesia sendiri hanya sebesar US \$ 9,1 billion. Pertumbuhan industri pariwisata pada tahun 2015 di Indonesia mencapai 10,3%, china sebesar 2,2%, pertumbuhan dunia sebesar 4,4% dan pertumbuhan wisatawan muslim sebesar 6,3%. Pertumbuhan wisatawan muslim yang besar dapat menjadi pasar yang baik bagi sasaran pengembangan wisata halal di Indonesia (Sofyan, 2017).

Wisata halal tidak hanya terfokus pada wisata religi tapi juga menyinggung infrastruktur, fasilitas yang ada, tersedianya produk-produk bersertifikat halal serta kesiapan cara agen mengemas perjalanan sehingga para pelaku pariwisata turut serta dalam pengembangan wisata halal. Fatwa Dewan

Majelis Ulama Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah menyebutkan bahwa dalam pengembangan wisata halal selain menyajikan daya tarik wisata juga terdapat fasilitas untuk beribadah, fasilitas dan akses yang mudah, menyediakan makanan dan minuman bersertifikat halal serta keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah. Penyelenggaraan wisata halal juga harus terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, zina, serta hal-hal lain yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Penduduk Pulau Madura khususnya di Kabupaten Sumenep mayoritas beragama Islam, keberadaan Madura yang identik dengan Islam dan kondisi sosial budaya masyarakat Madura yang islami sering dicitrakan sebagai pulau santri karena banyaknya pondok pesantren di Pulau Madura (Rohman, 2016). Banyaknya jumlah penduduk muslim di Pulau Madura dapat dijadikan potensi dalam pengembangan konsep wisata berbasis syariah di Pulau Madura. Berdasarkan data jumlah penduduk muslim di Pulau Madura, Kabupaten Sumenep memiliki jumlah penduduk muslim terbanyak pada tahun 2016 yaitu sebanyak 1.168.822 jiwa kemudian Kabupaten Bangkalan sebanyak 941.610 jiwa, Kabupaten Sampang 824.929 jiwa dan Kabupaten Pamekasan sebanyak 800.396 jiwa (Tumoutounews, 2017). Terdapat beberapa point yang mendasari pengembangan Madura sebagai destinasi pariwisata syariah yaitu (1) masyarakat Madura memiliki kondisi sosial budaya yang islami (2) masih berkembangnya kesenian islami di masyarakat, seperti hadrah, macopat, samman, dan lain-lain (3) banyak sekali keindahan alam yang menarik serta terdapat objek-objek wisata yang berbau religi (4) terdapat lembaga pendidikan islam dan pondok pesantren dengan sistem pendidikan yang khas dan modern (5) adanya

penolakan dari beberapa ulama Madura terkait pembangunan pariwisata yang tidak sesuai dengan norma-norma agama dan budaya yang berkembang di Madura (bpws, 2015).

Pada tahun 2014 Kabupaten Sumenep telah memiliki wacana untuk ikut mengembangkan wisata syariah untuk memberikan kenyamanan bagi wisatawan muslim. Bupati Sumenep menyatakan bahwa wisata syariah merupakan solusi untuk menyediakan tempat makan yang halal, tempat ibadah serta akomodasi yang aman bagi wisatawan muslim dan wisatawan non-muslim karena wisata syariah bukan wisata eksklusif sehingga semua wisatawan dapat menikmati pelayanan berbasis syariah tersebut. Sejumlah lokasi wisata yang ada juga akan digarap menjadi wisata syariah dengan menyesuaikan dengan kultur religi serta untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi dari sektor wisata syariah. Selain itu Bupati Sumenep A. Busyro juga menyebutkan bahwa telah melakukan penandatanganan kerjasama dengan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) terkait pengembangan wisata syariah di Sumenep, Bupati Sumenep juga yakin bahwa bukan hal yang mustahil apabila Sumenep menjadi ikon wisata syariah di Indonesia (bpws, 2015). Komitmen Bupati Sumenep terkait pengembangan wisata syariah di Kabupaten Sumenep juga telah disebutkan dalam lampiran Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sumenep Tahun 2018 bahwa pengembangan pariwisata berbasis syariah sebagai salah satu model alternatif dalam rangka diversifikasi daya tarik wisata yang bercirikan kearifan lokal. Namun anggota DPR RI Said Abdullah berpendapat bahwa wisata syariah sama dengan perda syariah yang menurutnya telah menciderai pluralitas dalam beragama. Menurut Said (2014) wisata syariah merupakan kepanjangan tangan dari formalitas agama dan

dikhawatirkan akan terkesan eksklusif sehingga wisatawan non-muslim akan enggan untuk berkunjung, jadi akan lebih baik memaksimalkan wisata yang telah ada (Koran Madura, 2014). Wisata syariah dianggap tidak cocok untuk pengembangan wisata di Madura khususnya di Kabupaten Sumenep karena namanya yang mengandung unsur agama dan terkesan eksklusif sehingga pengembangan wisata di Kabupaten Sumenep dapat disiasati dengan penggunaan wisata halal karena kata halal berbeda dengan syariah yang memiliki cakupan yang lebih luas termasuk mengatur manusia dan segala aspeknya sedangkan halal hanya mengatur cara penanganan dan material saja. Kata halal berarti boleh dimana segala sesuatu yang bebas dari bahaya dapat digunakan untuk kebutuhan fisik dan batin manusia. Objek wisata halal dapat berupa penyediaan rumah makan atau restoran serta hotel yang menyediakan makanan minuman bersertifikat halal dan tidak mengandung alkohol, penyediaan tempat ibadah, layanan jasa transportasi yang memudahkan wisatawan muslim untuk beribadah saat dalam perjalanan dan lain-lain. Konsep wisata halal dapat dikembangkan di Kabupaten Sumenep untuk memperkenalkan kearifan lokal budaya Madura. Pengembangan konsep wisata halal di Sumenep yang dipadukan dengan budaya lokalnya dapat memberikan ciri khas tersendiri untuk menarik wisatawan berkunjung ke Madura.

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana konsep wisata halal di Nusa Tenggara Barat?
- 2) Bagaimana pengembangan wisata di Kabupaten Sumenep dalam mengimplementasikan konsep wisata halal?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Mengetahui konsep wisata halal yang berkembang di Nusa Tenggara Barat untuk menjadi gambaran pengembangan konsep wisata halal di Kabupaten Sumenep
- 2) Mengetahui pengembangan wisata di Kabupaten Sumenep agar wisata halal dapat di implementasikan dengan baik

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian yang berkaitan dengan wisata halal.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan bagi peneliti, pembaca serta pemerintah Kabupaten Sumenep.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan urutan penyajian dari masing-masing bab secara terperinci, singkat dan jelas yang disusun dengan menguraikan ide pokok pada masing-masing bab sehingga diharapkan dapat mempermudah dalam memahami laporan penelitian. Adapun sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan pendahuluan dari seluruh penelitian yang memberikan gambaran ringkas tentang keseluruhan aspek yang akan dibahas dalam skripsi yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori yang berisi tentang teori-teori yang dapat dijadikan sebagai dasar pedoman dalam penelitian serta undang-undang atau peraturan terkait dengan penelitian. Bagian selanjutnya berisi tentang penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang lokasi dan pendekatan penelitian, fokus penelitian, populasi dan sampel, jenis penelitian dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta analisis data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi objek penelitian, serta membahas tentang pemasalahan sesuai dengan data yang ada dan menganalisis data.

BAB V: PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan yang berisi tentang keterangan singkat dari keseluruhan penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang diberikan oleh penulis